

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang merata kepada semua masyarakat Indonesia, hal itu tertuang pada Pasal 31 UUD NRI 1945. Pendidikan menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 secara garis besar mencakup tentang usaha secara sadar serta terencana dalam konteks mewujudkan dan mengembangkan proses pembelajaran, agar peserta didik bersikap proaktif mewujudkan kemampuannya. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak dari warga negara. Pendidikan yang merata ini diperlukan agar dapat meningkatkan kualitas warga negara di masa globalisasi saat ini, agar tidak tertinggal oleh jaman dan teknologi yang semakin maju. Pendidikan yang merata untuk warga negara dapat ditempuh melalui jalur formal dan nonformal.

Sedangkan pada UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (12) yaitu pendidikan di luar pendidikan jalur formal yang diimplementasikan dengan tertata dan berjenjang. Dalam pelaksanaan pendidikan non formal sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar pada pendidikan formal, yaitu terdapat kegiatan pembelajaran dan serangkaian ujian yang harus ditempuh agar dapat lulus. Ijazah atau hasil dari pendidikan non formal dianggap setara seperti pendidikan formal. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 26 ayat (6) bahwasanya hasil belajar berupa ijazah yang ditempuh melalui pendidikan jalur non formal dianggap setara dengan hasil belajar atau ijazah

yang didapat melalui pendidikan formal yang nantinya akan dinilai melalui proses penyetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Pendidikan non formal dibuat untuk mereka yang mau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, usaha, atau meneruskan taraf pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Program kesetaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berada pada jalur non formal yang terdiri dari Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/SMK/MA. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan ditujukan bagi warga negara putus sekolah atau untuk warga negara yang belum pernah bersekolah. Dengan tujuan utama dari pendidikan kesetaraan ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar memiliki peluang untuk bersaing dalam mencapai perekonomian di era globalisasi saat ini.

Proses pembelajaran tidak luput dari motivasi belajar, begitupun pada pendidikan non formal. Dalam pembelajaran sangat diperlukan motivasi yang diberikan untuk peserta didik agar mampu membangkitkan kreatifitas dan rasa ingin tau peserta didik sehingga pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Keaktifan dari peserta didik diharapkan dapat membawa dampak yang baik pada prestasi peserta didik. Menurut Sanjaya dalam (Damanik, 2021) mengatakan bahwa keberhasilan peserta didik dapat ditentukan melalui motivasi belajar yang dimilikinya. Tingginya motivasi peserta didik menandakan bahwa prestasi belajarnya juga tinggi dan maksimal. Menurut Fatimah & Ratna menyatakan dalam (Hendriani & Murdiono, 2021) bahwa strategi yang direncanakan merupakan kunci penting berlangsungnya

proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik mengakibatkan peserta didik berperan lebih aktif.

Realitanya yang terjadi di beberapa kasus peserta didik, motivasi belajar tidak selalu dapat dicapai dengan mudah dalam suatu proses pembelajaran. Beberapa contoh kasus dari kurangnya motivasi belajar ada pada mahasiswa semester 3 pada Pendidikan Non Formal di STKIP Muhammadiyah Enrekang. Kurangnya motivasi belajar tersebut dibuktikan dengan tidak adanya interaksi antara mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa kurang terlibat dalam belajar kelompok, sebagian besar mahasiswa mengeluh saat diberikan pelajaran. Kendala-kendala tersebut terjadi karena kurangnya penggunaan metode belajar yang bervariasi (Tahir & Elihami, 2019).

Contoh lainnya adalah motivasi belajar di kelas Kesetaraan Paket C di Enrekang dalam (Damanik, 2021) terutama dalam mata pelajaran PKn. Rendahnya motivasi belajar peserta didik bisa ditandai dari perilaku yang mereka tunjukkan seperti datang terlambat, tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak aktif saat pembelajaran berlangsung, dan tidak mengerjakan tugas yang guru berikan. Faktor penyebab kurangnya motivasi belajar tersebut yaitu pada saat proses belajar, guru PKn hanya menggunakan media papan tulis dan LKS saja, sehingga diperlukan adanya eksplorasi terhadap media pembelajaran yang digunakan agar dapat membuat peserta didik tertarik.

Dari kedua contoh kasus di atas, peran dari guru ketika pembelajaran berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Menurut Emda (2017) motivasi memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dorongan

motivasi tidak muncul dari dalam diri peserta didik saja, melainkan memerlukan keterlibatan guru. Hal ini membuktikan bahwasanya motivasi yang diberikan dapat berupa kreatifitas guru dalam proses belajar dapat membangkitkan semangat dan peserta didik akan mengetahui arah belajarnya. Dengan itu, maka peserta didik akan merasa tertarik dalam pembelajaran yang dia ikuti.

Menurut Lestari dan Arpanudin (2020) mengatakan bahwa pembelajaran PKn masih memerlukan perbaikan. Saran yang dapat diberikan adalah dengan cara meningkatkan kreativitas guru dengan melakukan penerapan inovasi pembelajaran dengan model, media, dan metode yang bervariasi. Pendidikan Kewarganegaraan masuk merupakan mata pelajaran dalam UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan). Karena itu, peran guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran untuk menanamkan kebaikan dalam pendidikan, moral, etika, toleransi antar sesama agar menjadi warga negara yang baik.

Menurut Doğanay dalam (Aulia & Arpanudin, 2019) Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pengetahuan, nilai, dan keterampilan beserta penerapannya di kehidupan nyata dengan aktif berpartisipasi. Peran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sekedar memberi edukasi agar memahami hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki peran untuk membentuk warga negara dunia (global society).

Pendidikan non formal pada Kabupaten Malang telah mulai dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). SKB ialah bentuk layanan pendidikan dalam bentuk pendidikan non formal dan dilakukan di bawah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan

masyarakat melalui jalur pendidikan non formal. SKB Kabupaten Malang telah berdiri pada tahun 1978 dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No 0206/1978 tanggal 23 Juni 1978.

Pelaksanaan pendidikan non formal tidak selalu berjalan tanpa kendala. Sejatinya pendidikan non formal tidak berfokus pada memberikan pembelajaran pada masyarakat saja, tetapi juga menyediakan pendidikan luar sekolah yang layak untuk peserta didik. Beberapa kendala pada pendidikan non formal adalah standar penyelenggaraan pendidikan yang masih belum jelas, kurangnya penyelenggara pendidikan non formal yang belum profesional, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menempuh pendidikan, dan kurangnya tenaga guru.

Pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Mojokerto memiliki kendala kurangnya pamong belajar yang membuat beberapa guru merangkap tugasnya. Pada pelaksanaan pembelajaran pun beberapa pamong tidak hadir dengan sengaja dan hanya memberikan tugas saja. Pada SKB Trenggalek kendala yang dialami adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengoperasikan E-Learning dikarenakan kurangnya pengalaman dalam penggunaan teknologi, khususnya pada guru yang telah berusia lanjut. Pada pelaksanaan pembelajaran di PKBM Widya Dusun Jambon, Yogyakarta, pada kegiatan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKn masih belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut disebabkan guru masih menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah yang monoton yaitu terlalu berpusat pada guru.

Kendala yang telah dijelaskan di atas itulah yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan menurunnya motivasi belajar pada peserta didik. pada saat

pembelajaran seharusnya guru mampu menjadi pemantik motivasi peserta didik dengan cara memaksimalkan kemampuannya dalam menggunakan berbagai metode, strategi, dan media dalam kegiatan pembelajaran.

Berangkat dari penjelasan umum permasalahan diatas peneliti akan mengangkat judul Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran guru PPKn dalam proses pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi belajar terutama di Paket C Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang. Kemudian, membahas mengenai faktor penghambat apa yang dialami guru PPKn serta solusi yang dapat dilakukan guru PPKn agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan merumuskan masalah ke dalam beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang?
2. Apa kendala yang dialami guru PPKn dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang?

3. Bagaimana solusi yang dilakukan guru PPKn dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pemaparan latar belakang beserta rumusan masalah, peneliti akan merumuskan tujuan penelitian ke dalam beberapa poin yaitu :

1. Untuk menganalisis peran guru PPKn dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dialami guru PPKn dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang.
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan guru PPKn dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik pada Program Kesetaraan Paket C di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang.

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari penjelasan di atas peneliti berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan. Berikut manfaat yang dapat diambil yakni :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang peneliti harapkan adalah dapat memberikan wawasan mengenai pendidikan non formal di Sanggar Kelas Bersama (SKB) Kab. Malang dan peran guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar khususnya pada

mata pelajaran PPKn. Kemudian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran PPKn pada ranah pendidikan non formal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta Didik

Dapat dijadikan masukan sehingga peserta didik dapat menumbuhkan sekaligus meningkatkan motivasi belajar untuk mendapat hasil belajar yang optimal.

b. Bagi Guru

Dapat menjadi masukan dan informasi mengenai solusi terkait kendala-kendala yang ditemui ketika proses pembelajaran berlangsung guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai informasi baru terkhususnya pada saat pembelajaran PPKn, sehingga kualitas pembelajaran di ranah pendidikan non formal semakin meningkat.

d. Bagi Peneliti

Penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan konseptual baru dan menjadi referensi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan motivasi belajar khususnya pada mata pelajaran PPKn.

F. Batasan Istilah

Batasan istilah bertujuan agar menghindari salah pengertian pada pembahas ini, oleh sebab itu penulis akan menjabarkan batasan istilah terhadap kata kunci dari penelitian ini, antara lain :

1. Peran Guru

Peran guru pada proses pembelajaran umumnya sebagai penyelenggara lingkungan belajar dan fasilitator. Pengertian secara luas peran guru menurut Oemar Hamalik dalam (Zein, 2016) yaitu guru sebagai : 1) Model, 2) Perencana, 3) Peramal, 4) Pemimpin, 5) Penunjuk jalan.

Dalam konteks pendidikan guru berperan sebagai pelaksana proses pembelajaran yang keberhasilannya dalam mengajar menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu hal yang wajar jika masyarakat dan pemerintah sangat berharap kepada guru dalam mencapai keberhasilan pendidikan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa guru merupakan inti utama dalam lembaga pendidikan yang berada di garda depan.

2. PPKn

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas No 22 Tahun 2006 memuat sebuah ketentuan bahwa berfokus pada pembinaan masyarakat yang beragam agar mereka dapat memahami hak-haknya dan menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang menguasai keterampilan (*skills*), pengetahuan (*knowledge*), dan sikap (*attitudes*) sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan mengingatkan akan pentingnya suatu nilai-nilai hak dan kewajiban.

3. Motivasi Belajar

Motivasi belajar peserta didik mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses belajar. Menurut Sanjaya dalam (Damanik, 2021) keberhasilan belajar dari peserta didik ditentukan oleh motivasi belajarnya. Motivasi belajar tinggi yang

dimiliki peserta didik berarti nilai yang didapatkannya juga tinggi. Sebaliknya, motivasi belajar yang rendah akan menyebabkan hasil akademik yang buruk. Menurut Santrock dalam (Damanik, 2021) motivasi merupakan proses untuk memberikan semangat, mengarahkan, serta kegigihan yang bertahan lama. Motivasi dapat digambarkan sebagai tingkah laku dan kemauannya untuk mau melakukan sesuatu berdasarkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya.

4. Program Kesetaraan Paket C

Menurut Hasviana, dkk (2021) yakni bagian dari pendidikan yang berbentuk non formal setara dengan SMA/SMK/MA. Peserta didik yang telah menempuh pendidikan pada program kesetaraan paket C akan mendapatkan ijazah yang dianggap setara dengan ijazah pendidikan formal SMA/MA yang mana dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.